PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Kedaulatan Rakyat Hari: Jumat Tanggal: 17 November 2023 Halaman: 2

DPRD KOTA YOGYAKARTA
SUARA WAKIL RAKYAT
JL. IPDA TUT HARSONO 43 YOGYAKARTA TELP.(0274) 540650

JANGAN JADIKAN MASYARAKAT OBJEK KEGIATAN

Akomodir Kegiatan Nonfisik di Wilayah

YOGYA (KR) - Usulan program yang ditampung melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) masih banyak yang mengedepankan kegiatan fisik. Padahal kegiatan sosial kemasyarakatan yang yang sifatnya nonfisik juga tidak kalah penting dan selayaknya diakomodir oleh pemerintah. Hal ini agar masyarakat tidak selamanya harus kerja bakti untuk mengadakan sebuah kegiatan.

Marwoto Hadi
Fraksi Partai Gerindra

KR-Istimewa

Anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Kota Yogya Marwoto Hadi, berharap kalangan kemantren dan kelurahan bisa turut mendampingi dan mengarahkan ketika musrenbang di tingkat bawah digelar. "Program fisik itu boleh, tetapi kegiatan yang nonfisik juga jangan dikesampingkan. Itu juga harus diarahkan supaya masuk dalam musrenbang dan akhirnya mampu difasilitasi oleh negara," urainya.

Kegiatan nonfisik yang digelar oleh elemen masyarakat baik kaum muda, pengurus kampung, tingkat RT dan RW justru menjadi hal strategis dalam membangun ketahanan sosial. Jika selama ini warga harus patungan atau merogoh dompet pribadi untuk membiayai setiap kegiatan di wilayah; maka kehadiran negara patut dipertanyakan. Apalagi itu berkaitan dengan ketahanan sosial. Pasalnya, kegiatan yang digelar oleh masyarakat dan untuk masyarakat akan memperkuat interaksi sosial serta ketahanan sosial pun bakal terajut.

Oleh karena itu, Marwoto yang duduk sebagai Sekretaris Komisi A ini berharap agar kegiatan nonfisik juga mendapatkan porsi dalam usulan yang disampaikan melalui musrenbang. Selain itu juga jangan hanya menjadikan masyarakat sebagai objek kegiatan. "Sekali atau dua kali boleh lah patungan untuk membiayai kegiatan, tapi jangan seterusnya seperti itu karena akan membebani masyarakat. Padahal pemerintah sebenarnya mampu mengakomodasi," tandasnya.

Selain itu, dirinya juga mengusulkan supaya kegiatan masyarakat yang berbasis budaya untuk mengakses dana keistimewaan (danais). Pasalnya jika mengandalkan APBD Kota Yogya dikhawatirkan belum mampu mengakomodir seluruhnya. Apalagi kemantren dan kelurahan bagian dari keistimewaan sehingga memiliki peluang dalam mengakses danais.

(Dhi)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005